



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 39, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pegelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1067);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo

- (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. di atas Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
 - c. di bawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo dihitung dari Data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.	Pendapatan umum :					
1.	Pendapatan asli daerah			Rp.	199.894.767.510	
2.	Dana bagi Hasil :			Rp.	38.789.323.015	
	a)	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Pusat)	Rp.	38.789.323.015		
3.	Dana Alokasi Umum			Rp.	841.407.175.000	
	Total Pendapatan Umum			Rp.	1.080.091.265.525	
b.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan + Tamsil (PNSD))				Rp.	733.466.401.658
1.	Gaji Pokok		Rp.	394.472.202.244		

2.	Tunjangan Keluarga	Rp.	34.737.944.658		
3.	Tunjangan Jabatan	Rp.	4.854.690.000		
4.	Tunjangan Fungsional	Rp.	28.013.875.000		
5.	Tunjangan Umum	Rp.	4.790.748.000		
6.	Tunjangan Beras	Rp.	20.263.641.859		
7.	Tunjangan PPh	Rp.	6.322.638.915		
8.	Pembulatan	Rp.	5.303.085		
9.	Iuran Askes	Rp.	11.103.042.567		
10.	Iuran Asuransi kecelakaan kerja	Rp.	1.818.225.293		
11.	Tunjangan Profesi Guru	Rp.	176.207.475.440		
12.	Tambahan Penghasilan PNSD	Rp.	50.876.614.597		
	Jumlah	Rp.	733.466.401.658		
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2015				Rp.	346.624.863.867

Pasal 4

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikategorikan dalam Kelompok sedang.

BAB III DANA OPERASIONAL

Pasal 5

Pemberian Dana operasional bagi Daerah yang tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Sedang, dengan ketentuan :

- a. Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing- masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali Rp.2.100.000,00 = Rp. 8.400.000,00;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 3 orang kali Rp. 2.100.000,00 = Rp. 15.750.000,00.

BAB IV TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar 5 (lima) kali Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00;
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar 5 (lima) kali Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00;
 - c. Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00;

BAB V TUNJANGAN RESES

Pasal 8

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar 5 (lima) kali Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00;
 - c. Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00.

BAB VI TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRASPORTASI DAN STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan;

- (2) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Rumah tangga dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (4) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (5) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Wonosobo hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Wonosobo tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000,00 perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,00 perbulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.000.000,00 perbulan.
- (2) Besaran tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 8.500.000,00 perbulan.

BAB VII
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 13

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan kewenangan DPRD salah satunya berupa penyediaan tenaga kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai

- dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
 - (6) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengadaan kelompok pakar atau Tim Ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Hak keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUFATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 48